

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Perkembangan peran UMKM yang besar juga ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja (Suci, 2017).

Jumlah UMKM yang ada di Indonesia saat ini semakin bertambah banyak, ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada 2022. Namun jumlah UMKM ini ternyata tidak sebanding dengan tingkat daya saing yang dimiliki UMKM tersebut, baik secara lokal maupun internasional. Jika diperhatikan, kebanyakan UMKM di Indonesia hanya melakukan proses produksi, berdagang, dan berekonomi, sehingga membuat daya saing UMKM di Indonesia tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar maupun eksis di pasar global. Banyak UMKM di Indonesia memulai usahanya tersebut karena adanya desakan ekonomi bukan karena mereka memiliki produk yang unik atau keterampilan pada bidang tertentu. Tentu saja kondisi ini akhirnya membuat sebagian besar dari UMKM di Indonesia tidak memiliki daya saing, dimana bahwasannya untuk tetap bertahan dan berkembang di dalam dunia bisnis

yang semakin ketat, seharusnya pelaku UMKM memiliki keterampilan, dapat bekerja secara profesional, dapat mengatur keuangan dengan baik, serta mampu menciptakan inovasi-inovasi pada bisnis mereka (Rahmawati, 2016). Adapun perkembangan jumlah UMKM berdasarkan klasifikasi usaha di Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2021

| No | Klasifikasi Usaha | Tahun | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Usaha Mikro | 44.670 | 47.311 | 55.173 |
| 2 | Usaha Kecil | 3.662 | 9.654 | 10.827 |
| 3 | Usaha Menengah | 225 | 234 | 351 |
| 4 | Usaha Besar | 17 | 17 | 17 |
| Total | | 54.489 | 57.216 | 66.368 |

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng (2022)

Berdasarkan data pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng, perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2020 sebesar 54.489 usaha, dan pada tahun 2021 sebesar 57.216 sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 2.727. Adapun data jumlah yang diklasifikasikan berdasarkan perkecamatan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019-2021 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021

| No | Klasifikasi Usaha | Tahun | | | Jumlah |
|----|-------------------|-------|------|------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Tejakula | 120 | 99 | 100 | 418 |
| 2 | Busungbiu | 71 | 55 | 43 | 224 |
| 3 | Seririt | 69 | 41 | 0 | 151 |
| 4 | Banjar | 95 | 34 | 37 | 200 |
| 5 | Buleleng | 153 | 115 | 69 | 452 |

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|-----|-----|------|
| 6 | Kubutambahan | 45 | 24 | 19 | 112 |
| 7 | Sukasada | 106 | 59 | 37 | 261 |
| 8 | Sawan | 83 | 83 | 27 | 276 |
| 9 | Gerokgak | 144 | 284 | 292 | 720 |
| Total | | 886 | 794 | 624 | 2814 |

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng (2022)

Berdasarkan data di atas UMKM Kecamatan Buleleng memiliki jumlah UMKM sebanyak 452. Perkembangan UMKM di Kecamatan Buleleng menuntut pelaku UMKM untuk tetap eksis dan kompetitif dengan UMKM lainnya sehingga mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha baru dan berbeda, sambil mempertahankan tingkat kinerja. Karena mayoritas pengusaha UMKM kurang memiliki wawasan dan informasi yang luas, sehingga kurang fokus dalam jangka panjang (Saputra, 2021).

Dari hasil wawancara awal, yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng, menyatakan bahwa tidak semua usaha bisa bertahan terlebih lagi dalam kondisi setelah pandemi. Terdapat beberapa usaha yang hanya bertahan beberapa tahun saja, padahal jika pelaku usaha mampu menciptakan strategi yang baik dalam mengelola usahanya yang tentu akan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan usahanya. Upaya untuk meningkatkan kinerjanya sering kali bersifat tradisional karena kurangnya keahlian manajemen, khususnya pada bidang keuangan. Masalah yang sering dihadapi pelaku UMKM antara lain kualitas sumber daya manusia, penyesuaian dengan usaha masa kini dan permodalan. Jika tidak segera diatasi, maka akan berdampak negatif terhadap kinerja UMKM.

Perkembangan UMKM mengharuskan para pelaku UMKM untuk bertahan dan siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya. Hal ini memacu para pelaku

UMKM agar menciptakan usaha-usaha yang baru dan berbeda, tentunya dengan kinerja yang baik. Pihak dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng juga menyatakan bahwa, kebanyakan pemilik UMKM tidak memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas, sehingga kurang berorientasi jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan kinerjanya cenderung bersifat konvensional karena kurangnya pengetahuan keuangan atau biasa disebut literasi keuangan. Misalnya, dalam penentuan harga produk sering hanya berorientasi pada kondisi umum di lingkungan industrinya dan tenaga kerja jarang diperhitungkan. Dengan demikian, mereka sering keliru dalam mengukur produktivitas usaha yang pada akhirnya bermuara pada kinerja usaha.

Kinerja berarti prestasi kerja, sedangkan prestasi kerja adalah hasil kerja, sehingga kinerja ialah pencapaian atau prestasi yang dicapai oleh organisasi atau entitas selama periode waktu tertentu yang diukur berdasarkan standar yang ditetapkan (Rahmayani, 2019). Pengukuran kinerja adalah sarana untuk mengevaluasi wirausahawan untuk membantu mereka meningkatkan kinerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh suatu bisnis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kinerja dapat diukur dalam hal pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, penambahan tenaga kerja, perluasan pasar dan pemasaran, serta pertumbuhan laba.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa UMKM untuk melihat bagaimana kinerjanya. Dari 10 UMKM, hanya tiga yang memiliki kinerja yang tinggi, sedangkan dua diantaranya memiliki kinerja menengah, dan sebanyak lima menunjukkan kinerja yang rendah. Berdasarkan penemuan di lapangan, ini hampir seluruh UMKM menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak

penurunan kinerja. Dampak terbesar terjadi pada penurunan angka penjualan, kesulitan bahan baku, penurunan produksi, permodalan, terhambatnya distribusi, dan yang paling parah adalah PHK. Permasalahan tersebut tentu akan mengganggu keberlangsungan usaha dan berdampak pada kinerja UMKM. Melihat permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi faktor menurunnya kinerja UMKM, karena demi keberlangsungan usaha yang baik pada UMKM tersebut sangat perlu untuk kinerja UMKM ditingkatkan.

Jika dilihat dari tiga UMKM yang memiliki kinerja yang tinggi, pemilik usaha melakukan manajemen dengan baik pada usahanya, seperti melakukan pelatihan dan bimbingan pada tenaga kerja termasuk juga memberikan akses untuk literasi tentang keuangan. Selain itu, pemilik usaha juga memanfaatkan seluruh akses permodalan yang ada saat ini, terutama kredit usaha rakyat yang memiliki bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah, sehingga memudahkan untuk pemilik usaha bisa mengembangkan usahanya. Terakhir, memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini yang dapat memudahkan pelaku usaha dan juga konsumen.

Berbagai faktor dapat memengaruhi kinerja UMKM, yaitu faktor internal maupun eksternal. (Munizu Musran, 2010) menyebutkan faktor-faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek teknik produksi atau operasional, dan aspek pasar dan pemasaran. Sedangkan faktor-faktor eksternal terdiri dari, aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, dan aspek peranan lembaga terkait. Penelitian ini mencoba untuk meneliti tiga faktor yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu aspek

sumber daya manusia dalam hal ini ialah literasi keuangan serta aspek keuangan yang meliputi akses pembiayaan modal kerja dan *financial technology*.

Fakta menunjukkan bahwa kini akses untuk meningkatkan literasi keuangan semakin luas dan terbuka. Setiap orang dapat mengakses pengetahuan terkait keuangan dengan bebas. Kini, literasi keuangan tidak hanya tersedia pada buku, kelas atau workshop keuangan, namun juga secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih terbilang rendah, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen. Walaupun angka tersebut naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen, namun jumlah tersebut masih belum setengah dari 100 persen, jadi masih lebih banyak jumlah masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami literasi keuangan, yaitu sejumlah 50,32 persen. Mengatasi rendahnya tingkat literasi keuangan tersebut, lembaga terkait juga pemerintah juga turut berpartisipasi. Seperti halnya OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara yang mengadakan literasi keuangan kepada kaum disabilitas, anggota PKK pelaku UMKM dan para tokoh masyarakat di Desa Bengkala, Kabupaten Buleleng.

Literasi keuangan didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku dalam meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Pada UMKM, literasi keuangan ini memberikan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan serta akses yang membuatnya untuk lebih berkembang. Sejalan dengan pernyataan tersebut, literasi keuangan seringkali dianggap sebagai alat yang penting digunakan untuk

membantu mengasah keterampilan seseorang serta meningkatkan kemampuan dalam hal pengaksesan yang terlihat dengan penerimaan dan penggunaan produk yang sesuai dengan keperluan (Deka, 2015). Menurut (Cohen & Nelson, 2011), literasi keuangan tidak hanya membantu dalam memahami berbagai instrumen keuangan namun juga dapat menyelesaikan permasalahan terkait akses dalam menggunakan produk keuangan yang pada akhirnya berdampak pada inklusi keuangan. (Leyshon, 1998) mengungkapkan bahwa dengan dimilikinya literasi keuangan berarti dapat melakukan pengelolaan keuangan dan pengawasan yang lebih baik. Namun sebaliknya, apabila tingkat literasi keuangan seorang individu rendah, maka akan berpengaruh terhadap perilaku yang tidak rasional dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan (Mandell, 2011).

Literasi keuangan sangat diperlukan bagi pelaku usaha termasuk UMKM agar UMKM mampu menentukan pilihan dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (Djuwita & Yusuf, 2018). UMKM dengan literasi keuangan yang baik maka akan mampu menerapkan rencana strategis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, memiliki akses keuangan yang memadai, serta merespon perubahan iklim bisnis yang tidak stabil, sehingga keputusan yang dibuat akan memberikan solusi inovatif dan terarah untuk peningkatan kinerja UMKM (Sanistasya et al., 2019).

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kinerja UMKM adalah akses pembiayaan modal kerja. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga

keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, sebagai contoh tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai (bi.go.id).

Menurut Sri Lestari, (2009), untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UKM paling tidak menghadapi tiga masalah, yaitu: (1) Masih rendahnya atau terbatasnya akses UKM terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura, (2) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha, serta (3) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

Permodalan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM dengan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan. Keterbatasan modal tersebut akan mempengaruhi kinerja UMKM yaitu menurunnya kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa secara efektif, berkurangnya jumlah tenaga kerja yang mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas, pendapatan usaha menjadi rendah karena tidak ada

barang yang dijual, dan efisiensi produksi tidak berjalan dengan baik sehingga biaya produksi menjadi tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal tersebut, terdapat salah satu akses pembiayaan modal kerja yang merupakan bentuk dukungan dari pemerintah yang dapat memudahkan UMKM untuk melakukan peminjaman atau kredit bagi usahanya bekerjasama dengan perbankan. Pemerintah meluncurkan program kredit untuk UMKM dan Koperasi dengan fasilitas penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Dengan adanya program KUR diharapkan UMKM memiliki semangat untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang pesat.

Pemberian kredit bagi UMKM memiliki pengaruh positif terhadap volume usaha. Kredit yang diterima UMKM digunakan untuk membeli kebutuhan bahan baku dan peralatan produksi. Peningkatan volume usaha akan berpengaruh pada meningkatnya produksi barang. Kegiatan produksi tidak akan berjalan jika bahan baku dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi tidak tersedia. Kredit modal kerja yang diberikan dapat membantu pengusaha UMKM dalam mengatasi permasalahan permodalan. Modal tambahan yang diperoleh UMKM dapat

digunakan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi (Mulyono, 2006).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digital yang produktif merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perdagangan digital diperkirakan akan tumbuh sebesar 33,2% dari tahun 2020 menjadi Rp337 triliun tahun 2021. Sementara transaksi digital banking diproyeksikan meningkat sebesar Rp32 triliun atau tumbuh 19,1% pada tahun 2021. Kinerja sebuah usaha saat ini tidak lepas dari kemajuan teknologi yang sangat berkembang dengan pesat, tidak hanya di Indonesia tetapi dunia juga merasakan perkembangan teknologi yang setiap waktunya berubah secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena teknologi yang setiap harinya berkembang dengan pesat dan telah memasuki di berbagai sektor, salah satunya pada sektor keuangan, yaitu *financial technology* yang merupakan teknologi untuk mendukung layanan jasa keuangan. Perkembangan *financial technology* banyak memunculkan inovasi aplikasi dalam layanan keuangan, seperti alat pembayaran, alat pinjaman dan lain-lain yang mulai terkenal pada masa digital ini (Muzdalifa et al., 2018).

Financial technology memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini *financial technology* mampu melayani *electronic money*, *virtual account*, *agregator*, *lending*, *crowdfunding* dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun *financial technology* yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup (Rizal et

al., 2018). *Financial technology* memberikan jasa berupa transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening seperti diperbankan pada umumnya. *Financial technology* tetap diatur oleh Bank Indonesia meskipun bukan lembaga keuangan seperti perbankan, hal ini bertujuan agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Bank Indonesia mengatur perusahaan penyelenggara *financial technology* untuk wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia menjelaskan *financial technology* mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, *financial technology* berperan dalam; 1) menyediakan pasar bagi pelaku usaha, 2) menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian dan kliring, 3) membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, 4) mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, 5) membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal. Perkembangan *financial technology* menimbulkan *creative disruption* untuk masyarakat Indonesia yang belum siap menerima perubahan dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, *financial technology* memberikan peluang baru bagi ekonomi untuk meningkatkan aktivitas perekonomiannya secara lebih efisien dan efektif *financial technology* telah membantu pembiayaan pelaku UMKM yang kurang memiliki akses pada perbankan. Dengan adanya regulasi yang matang mendorong UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan peminjaman transaksi yang mudah melalui *financial technology* (Rahardjo et al., 2019).

Saat ini banyak masyarakat yang beralih ke *financial technology* dikarenakan masyarakat sekarang ingin semua berjalan dengan cepat dan mudah, tanpa ada batasan–batasan serta aturan–aturan yang ketat. Hal ini menunjukkan

bahwa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi serta kemudahan dalam bertransaksi merupakan faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan *financial technology* dan hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu berupa kemudahan pencatatan, kemudahan proses transaksi serta meningkatkan penjualan (Sugiarti et al., 2019).

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana literasi keuangan, kredit usaha rakyat serta *financial technology* dalam memengaruhi kinerja usaha mikro, kecil dan menengah, yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Kredit Usaha Rakyat, dan *Financial Technology* Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Buleleng”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa masalah teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingkat literasi yang rendah membuat masyarakat kurang memahami bagaimana memanfaatkan produk atau jasa mereka sesuai dengan kebutuhan dan kurang memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan yang lebih efisien. Hal ini membuat masyarakat mudah tertipu dalam menggunakan uang mereka.
- 2) Banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya dan ingin mengajukan pinjaman di Bank, namun usahanya masih belum *bankable*.

- 3) Faktor kredit macet dan enggan berurusan dengan perbankan yang menjadi penghambat atau kendala bagi para pelaku usaha dalam mengajukan pinjaman ke Bank.
- 4) Industri keuangan non-bank (*fintech*) menjadi sebuah ancaman bagi dunia perbankan karena layanan *fintech* disebut memiliki prosedur yang lebih mudah jika dibandingkan dengan bank yang memiliki prosedur ketat.
- 5) Masih sulit untuk penggunaan atau pemanfaatan teknologi adalah permasalahan utama bagi UMKM. Serta kurangnya pemanfaatan fungsi utama teknologi sebagai alat untuk memudahkan setiap transaksi yang dilakukan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksud agar penelitian lebih terfokus pada topik yang memang menjadi pokok permasalahan. Masalah yang akan diteliti adalah pengaruh literasi keuangan, kredit usaha rakyat, dan *financial technology* terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah.

- 1) Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng?

- 2) Apakah kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng?
- 3) Apakah *financial technology* berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk.

- 1) Menguji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng.
- 2) Menguji pengaruh kredit usaha rakyat terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng.
- 3) Menguji pengaruh *financial technology* terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan bisa memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi yang terkait dengan pengaruh literasi keuangan, kredit usaha rakyat, dan *financial technology* terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah.

2) Manfaat Praktis

Bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan kinerja usaha mikro kecil dan menengah.

